

PENANGGUHAN RUSIA DALAM KEANGGOTAAN UNITED NATION HUMAN RIGHTS COUNCIL (UNHRC)

Rohatul Maliha,¹ Pinastika Prajna Paramita,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65145. (0341) 551932
Email: rohatlmaliha.0909@gmail.com

ABSTRACT

The state is an organization of sovereign power with a government system that enforces order in certain areas. Recently there was an armed conflict between Russia and Ukraine. The conflict started due to Ukraine's desire to join NATO (North Atlantic Treaty Organization) which was opposed by Russia. Russia says that voting by UN member states is illegal and politically motivated. What is the position of the United Human Rights Council (UNHRC) in the United Nations (UN) statutes? How is Russia's Suspension of Membership in the United Human Rights Council (UNHRC)? Normative Research. The UNHRC was created by the general assembly by resolution 60/251 replacing the Human Rights commission. Russia was suspended from the UNHRC after its actions carried out an attack on Ukraine as a result of the decision Russia decided to leave the UNHRC.

Keyword: membership suspended, Russia, United Nation Human Rights Council

ABSTRAK

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan sistem pemerintahan yang menegakkan ketertiban di wilayah tertentu, Baru-baru ini terjadi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, Konflik berawal dikarenakan keinginan Ukraina bergabung dengan (North Atlantic Treaty Organization) NATO yang ditentang oleh Rusia. Rusia mengatakan bahwa pemungutan suara oleh negara-negara anggota PBB adalah ilegal dan bermotivasi politik. Bagaimana kedudukan *United Human Rights Council* (UNHRC) dalam statute Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Bagaimana Putusan Penangguhan Rusia dalam Keanggotaan *United Human Rights Council* (UNHRC)?. Penelitian Normatif. UNHRC dibentuk oleh majelis umum dengan resolusi 60/251 menggantikan komisi Hak Asasi Manusia. Rusia ditangguhkan dari UNHRC setelah aksinya melakukan serangan terhadap Ukraina akibat dari putusan tersebut Rusia memutuskan keluar dari UNHRC.

Kata Kunci: Penangguhan Keanggotaan, Rusia, Dewan Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan sistem pemerintahan yang menegakkan ketertiban di wilayah tertentu. Menurut Konvensi Montevideo (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* (1933)) negara harus memiliki kualifikasi: a) *a permanent population*; b) *a defined territory*; c) *government*; and d) *capacity to enter into*

¹ Mahasiswa Proram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Malang

*relations with the other states.*⁴ Negara memiliki status dalam hukum internasional sebagai entitas. Mereka bertanggung jawab atas tindakan resmi atas nama mereka, negara bisa membuat perjanjian dan berperang, negara memiliki hak atas wilayah dan orang. Hubungan antar negara adalah tindakan, kesepahaman, atau komitmen otoritatif dari otoritas pemerintah, para pemimpin dari suatu negara atau warga negaranya, baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional.

Di dunia modern, hubungan antar negara beroperasi pada dua tingkat. Yang pertama adalah tingkat bilateral. Misalnya AS dan China yang tidak sependapat tentang isu yang menyangkut Taiwan, Laut China Selatan, atau bagaimana denuklirisasi Semenanjung Korea, perwakilan mereka berkomunikasi satu sama lain untuk mencoba mengatasi ketidaksepakatan mereka, hal tersebut termasuk dalam hubungan antar negara tingkat bilateral. Yang kedua adalah tingkat multilateral. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menempatkan sanksi ekonomi pada Korea Utara. Sebagian besar dari 193 negara anggota PBB sendiri tidak memiliki masalah dengan Korea Utara, tetapi mereka mengikuti sanksi karena PBB mengatakan demikian.⁵ Dikalangan para Sarjana Hukum Internasional terdapat dua golongan besar, yang sampai saat ini saling bertentangan. Golongan yang pertama berpendapat bahwa apabila semua unsur-unsur negara lebih dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan suatu negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya.⁶

Baru-baru ini terjadi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Konflik berawal dikarenakan keinginan Ukraina bergabung dengan (*North Atlantic Treaty Organization*) NATO yang ditentang oleh Rusia. Pada bulan Januari tahun 2021 Presiden Ukraina mendesak Presiden Amerika Joe Biden, untuk menyetujui Ukraina memasuki NATO. Hal itu membuat Rusia menentang keinginan Ukraina tersebut. Beberapa kali Rusia menunjukkan ketidaksetujuan atas keputusan Ukraina tersebut akan tetapi Ukraina tetap dalam pendiriannya ingin bergabung dengan NATO. Vladimir Putin, Presiden Rusia menawarkan sebuah perjanjian agar Ukraina tidak masuk dalam anggota NATO, akan tetapi perjanjian tersebut ditolak sehingga Rusia memilih jalan terakhir dengan melakukan serangan bersenjata kepada Ukraina. Akibat dari serangan senjata tersebut, Rusia dituduh

⁴ *Montevideo Convention on the Right and Duties of States (1993)*

⁵ Jacob L. Shapiro, *International Organizations Are Tools for Powerful Countries*. Diakses pada Desember, 23, 2022. <https://geopoliticalfutures.com/international-organizations-tools-powerful-countries/>

⁶ Abid Zamzami, dkk., 2021, *Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*, Malang: Unisma Press, h. 41

telah membunuh warga sipil sehingga PBB mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tanggal 7 April 2022 Majelis Umum PBB (UNGA) telah memberikan suara mendukung resolusi yang diprakasai AS untuk menagguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*United Nations Human Right Council*).

Rusia mengatakan bahwa pemungutan suara oleh negara-negara anggota PBB adalah ilegal dan bermotivasi politis. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian muncul pertanyaan terkait Bagaimana kedudukan *United Human Rights Council* (UNHRC) dalam statute Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? dan Bagaimana Putusan Penangguhan Rusia dalam Keanggotaan *United Human Rights Council* (UNHRC) ?. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan *United Human Rights Council* (UNHRC) dalam statute Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Untuk mengetahui putusan penangguhan Rusia dalam Keanggotaan *United Human Rights Council* (UNHRC).⁷ Manfaat dari penelitian adalah Dapat memberikan pengetahuan terbaru terkait keilmuan dibidang Hukum Internasional. Terutama dalam hal organisasi internasional serta memahami tentang konflik yang melibatkan antar negara, Dapat memberikan informasi kepada masyarakat internasional khususnya para pembaca mengenai penyelesaian konflik antar negara yang melibatkan organisasi internasional.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersifat yuridis normative. Bagaimana kedudukan *United Nation Human Rights Council* dalam statute pbb? dan bagaimana pengambilan keputusan penangguhan Rusia dalam *United Nation Human Rights Council*. Metode pendekatan dalam penelitian yang dikaji ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Konvensi Internasional (*international coinvetion*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan histori (*history approach*).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *United Nation Human Rights Council* (UNHRC) dalam Statuta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang berdiri pada

⁷ Aljazeera. *UN Suspend Russia from Human Rights body over Ukraine abuse*. Diakses pada, Juni 15, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/7/un-to-vote-on-suspending-russia-from-rights-council>

tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Tujuan dan prinsip PBB terkandung dalam piagam PBB. Badan utama PBB adalah Majelis Umum (UNGA), Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Semuanya didirikan pada tahun 1945 ketika PBB didirikan. *United Nation Human Right Council* (UNHRC) adalah badan antar pemerintah utama dalam system PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, dan untuk mengatasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.

UNHRC menanggapi keadaan darurat hak asasi manusia dan membuat rekomendasi tentang bagaimana menerapkan hak asasi manusia dengan lebih baik di lapangan. UNHRC memiliki kemampuan untuk membahas semua masalah tematik hak asasi manusia dan situasi khusus negara yang memerlukan perhatiannya. *United Nation Human Right Council* (UNHRC) dibentuk oleh Majelis Umum (UNGA) pada 15 Maret 2006 dengan resolusi 60/251, menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia.

United Nation Human Right Council (UNHRC) di beri mandate oleh Majelis Umum PBB untuk mempromosikan dan melindungi penikmatan dan realisasi penuh, oleh semua orang, semua hak asasi manusia. Pihak terkait yang menetapkan hak-hak tersebut yakni: Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hukum dan perjanjian hak asasi manusia internasional.

UNHRC dimanatkan sebagai berikut :

- 1) Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia untuk semua
- 2) Merekomendasikan agar badan-badan system PBB meningkatkan pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia
- 3) Mempromosikan dan melindungi hak atas pembangunan
- 4) Memberikan bantuan teknis kepada Negara untuk kegiatan hak asasi manusia
- 5) Mengkoordinasikan Pendidikan hak asasi manusia PBB dan program informasi public
- 6) Bekerja secara aktif untuk menghilangkan hambatan terhadap realisasi hak asasi manusia dan mencegah berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia
- 7) Terlibat dalam dialog dengan Pemerintah untuk menjamin penghormatan terhadap semua hak asasi manusia
- 8) meningkatkan kerja sama internasional untuk pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia

- 9) mengkoordinasikan kegiatan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh sistem PBB
- 10) merasionalisasi, mengadaptasi, memperkuat dan merampingkan *machinery* hak asasi manusia PBB.⁸

UNHRC terdiri dari 47 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas sederhana, melalui pemungutan suara rahasia. Anggota UNHRC dipilih untuk masa jabatan tiga tahun dengan sepertiga anggota diperbarui setiap tahun. Keanggotaan UNHRC didasarkan pada distribusi kursi geografis yang adil sesuai dengan pembagian wilayah berikut : 13 Negara Afrika, 13 Negara Asia-Pasifik, 8 Negara Amerika Latin dan Karibia, 7 Negara Eropa Barat dan Negara lain, 6 Negara Eropa Timur.

Terdapat 177 Negara telah menjabat sebagai anggota UNHRC sejauh ini, mencerminkan keragaman PBB memberikan legitimasi Ketika berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di semua negara.

UNHRC bertemu setidaknya 10 minggu per tahun di Kantor PBB di Jenewa, Swiss, dalam sesi reguler yang biasanya berlangsung pada bulan Maret, Juni, dan September. UNHRC dapat mengadakan pertemuan mendesak dalam waktu singkat untuk menanggapi krisis hak asasi manusia yang muncul 28 sesi khusus semacam itu diadakan sejauh ini. Badan-badan tambahan UNHRC bertemu selama sekitaar 20 minggu tambahan setiap tahun. Sejak sesi pertama pada tahun 2006, agenda UNHRC telah berkembang dan waktu pertemuannya menjadi lebih dari dua kali lipat.⁹

UNHRC adalah badan antar pemerintah dalam system Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dan untuk mengatasi situasi pelanggaran hak asasi manusia dan membuat rekomendasi untuk itu. UNHRC memiliki kemampuan untuk membahas semua masalah dan situasi hak asasi manusia tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun.

UNHRC mengadopsi resolusi 5/1 “paket pembangunan institusi” untuk memandu pekerjaannya dan mengatur prosedur dan mekanismenya. Mekanismenya meliputi tinjauan periodic universal, yang berfungsi sebagai “wadah pemikir” Dewan, yang memberikannya keahlian dan nasihat tentang isu-isu tematik hak asasi manusia.¹⁰

⁸ *United Human Rights Council. Mandate of UN Human Rights*. Diakses pada, Juni 03, 2023. <https://www.ohchr.org/en/about-us/mandate-un-human-rights>

⁹ *Booklet Human Rights Council*. H. 4

¹⁰ *United Nation Human Rights Council*. Diakses pada Juni, 04, 2023. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council>

Prosedur khusus adalah nama umum yang diberikan kepada mekanisme yang dibentuk oleh UNHRC untuk mengumpulkan pengamatan ahli dan nasihat tentang masalah HAM di seluruh belahan dunia. Prosedur khusus dikategorikan sebagai mandat tematik, yang berfokus pada fenomena utama pelanggaran HAM di seluruh dunia, atau mandat negara, yang melaporkan situasi HAM di negara atau wilayah tertentu. Prosedur khusus dapat berupa individu (disebut “pelapor independent” atau “ahli independent”), yang dimaksudkan untuk menjadi ahli independent di bidang HAM tertentu, atau kelompok kerja, biasanya terdiri dari lima anggota (satu dari setiap wilayah PBB).¹¹

UNHRC dibentuk oleh UNGA dengan resolusi 60/251, menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia. UNHRC menggunakan mekanisme tinjauan periodic universal, yang berfungsi untuk menilai situasi HAM di semua Negara Anggota PBB. Selain itu UNHRC memiliki Komite Penasihat yang berfungsi sebagai “wadah pemikir” Dewan, yang memberikan keahlian dan nasihat tentang isu-isu tematik HAM. UNHRC bekerja menggunakan prosedur khusus yang diberi mandat sebagai pelapor khusus, ahli independent, perwakilan khusus atau anggota kelompok kerja untuk memantau, memeriksa, memberi saran dan melaporkan secara public tentang isu-isu tematik HAM di negara tertentu.

Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun sejarahnya, UNHRC :

- a. Memutuskan untuk mengizinkan delegasi untuk memilih dari jarak jauh
- b. Menjadi tuan rumah jumlah pejabat terbesar yang pernah berbicara di sesinya
- c. Mendukung partisipasi 19 delegasi dari negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil melalui Dana Perwalian SIDS/LDC.¹²

B. Pengambilan Keputusan Penangguhan Rusia dalam Keanggotaan United Nation Human Rights Council

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) telah memilih untuk menangguhkan Rusia dari badan HAM terkemuka UNHRC ditengah tuduhan bahwa tentaranya membunuh warga sipil saat mundur dari wilayah sekitar ibu kota Ukraina. Resolusi yang diprakasai Amerika Serikat pada hari Kamis mencapai dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara UNGA yang diperlukan untuk disahkan, dengan 93 suara

¹¹ Special Procedures of the Human Rights Council. Diakses pada, Juni, 10, 2023.
<https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council>

¹² United Nation Human Rights Council. *About UHNRC*. Diakses pada, Juni, 12, 2023.
<https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council>

mendukung dan 24 menentang. Lima puluh delapan negara abstain, tetapi suara mereka tidak diperhitungkan dalam perhitungan akhir.

Resolusi singkat tersebut menyatakan “keprihatinan besar atas krisis HAM dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, khususnya atas laporan pelanggaran dan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Federasi Rusia, termasuk pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran HAM.

Pemungutan suara, yang menjadikan Moskow sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang kenaggotannya dicabut dari badan PBB mana pun, segera disambut oleh KYV tetapi dikritik oleh Moskow.

Rusia telah meminta sejumlah negara yang tidak ditentukan untuk memilih “tidak”, mengatakan abstain atau tidak memberikan suara akan dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan mempengaruhi hubungan bilateral. Dalam apa yang disebut “*non-paper*” yang diperoleh kantor berita *The Associated Press*, Rusia mengatkaan upaya untuk mengeluarkannya dari UNHRC adalah tindakan politik oleh negara-negara yang ingin mempertahankan posisi dominan dan kendali mereka atas dunia.

Moskow membantah pasukaannya bertanggung jawab atas kematian warga sipil. Duta Besar Rusia di Jenewa, Gennady Gatilov, menyebut tindakan AS itu “keberanian yang tidak berdasar dan murni emosional yang terlihat bagus di depan kamera-betapa AS menyukainya”.

“Washington mengeksploitsi krisis Ukraina untuk keuntungannya sendiri dalam Upaya mengecualikan atau menengguhkan Rusia dari organisasi internasional,” kata Gatilov, dalam komentar yang disampaikan oleh juru bicara misi diplomatic Rusia.

Sementara itu, China, Iran, dan Suriah termasuk di antara 24 negara yang menentang resolusi tersebut. “Langkah tergesa-gesa di Majelis Umum, yang memaksa negara-negara untuk memihak, akan memperparah perpecahan di antara negara-negara anggota, mengintensifkan konfrontasi antara pihak-pihak terkait seperti menambah bahan bakar ke dalam api,” Duta Besar China untuk PBB, Zhan Jun, katanya sebelum pemungutan suara.

Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, Bersama Inggris, China, Prancis dan AS. Semua saat ini memiliki kursi di UNHRC, yang bergabung Kembali dengan AS tahun ini. Meskipun dewan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, keputusannya mengirimkan pesan politik yang penting dan dapat mengizinkan penyelidikan. Moskow telah menjadi salah satu anggotanya yang paling vocal dan penengaruhannya melarangnya berbicara dan memberikan suara, kata para pejabat,

emskipun para diplomatnya masih dapat menghadiri debat. Satu-satunya negara lain yang hak keanggotaannya dicabut di UNGA adalah Libya pada 2011, Ketika pergolakan di negara Afrika Utara itu menjatuhkan pemimpin lama Muammar Gaddafi.¹³

Majelis Umum (UNGA) dapat menanggukkan hak dan keistimewaan anggota Dewan mana pun yang diputuskan telah terus-menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis selama masa keanggotaannya. Proses penanguhan membutuhkan dua pertiga suara mayoritas oleh UNGA. Resolusi yang membentuk UNHRC menyatakan bahwa “Ketika memilih anggota Dewan, Negara-negara anggota harus mempertimbangkan kontribusi para calon terhadap pemajuan dan perlindungan HAM serta janji dan komitmen sukarela yang buat dibuat untuk itu”, dan bahwa “anggota yang dipilih untuk Dewan akan menjunjung tinggi standar tertinggi dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan sebagai tanggapan atas rekomendasi yang dibuat oleh anggota Dewan, pada 1 Maret 2011 UNGA memilih untuk menanggukkan keanggotaan Libya mengingat situasi di negara tersebut setelah “penumpasan keras terhadap anti-kekerasan” oleh Muammar Gaddafi, pemrotes pemerintah”, Libya diangkat Kembali sebagai anggota Dewan pada 18 November 2011.

Pada 7 April 2022, hanya beberapa hari setelah materi fotografi dan video dari pembantaian bucha muncul, sesi khusus darurat kesebelas UNGA menanggukkan Rusia dari UNHRC karena pelanggaran HAM yang berat dan sistematis yang dilakukan selama invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Wakil duta besar Gennady Kuzmin mengatakan bahwa Rusia telah menarik diri dari dewan pada hari sebelumnya karena menunggu pemungutan suara.

Berbicara setelah adopsi resolusi dan penanguhan hak keanggotaan UNHRC, perwakilan Federasi Rusia mengatakan bahwa negaranya telah memutuskan untuk menanggukkan keanggotaan bahwa negaranya telah memutuskan untuk menanguhkan keanggotaan badan tersebut sebelum akhir masa jabatannya. Langkah itu, katanya, karena UNGA telah dibajak oleh satu kelompok negara untuk kepentingannya sendiri. Dia menggaris bawahi bahwa negaranya tidak dapat tetap menjadi bagian dari mekanisme yang memungkinkan negara untuk memeras orang lain untuk tujuan mereka sendiri, terutama karena negara yang sama telah secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia selama bertahun-tahun.

Perwakilan China juga menentang politisi HAN serta penerapan tekanan terhadap

¹³ Aljazeera. *UN Suspend Russia from Human Rights body over Ukraine abuse*. Diakses pada, Juni 15, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/7/un-to-vote-on-suspending-russia-from-rights-council>

negara tertentu atas nama hak tersebut. Langkah tergesa-gesa di Majelis telah memaksa negara-negara untuk memilih pihak, menetapkan presiden baru, ucapnya. Langkah untuk menghilangkan keanggotaan sah suatu Negara di Dewan Hak Asasi Manusia harus didasarkan pada fakta dan bukan melalui teks yang penyusunannya tidak dilakukan secara terbuka. Delegasi Kuba, sementara itu, memperingatkan agar tidak mengaktifkan penangguhan klausul keanggotaan di Dewan, mencatat bahwa hal itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik.

Perwakilan Kamboja memperingatkan bahwa pencopotan Federasi Rusia sebagai anggota Dewan hanya akan mengisolasinya dan semakin memperkuat situasi di Ukraina. Sebaliknya, ada kebutuhan untuk membangun lingkungan lingkungan yang lebih kondusif untuk dialog. “pada saat yang rapuh untuk perdamaian dunia, keamanan dan stabilitas, keterlibatan di antara Negara Anggota di semua badan PBB yang relevan, termasuk UNHRC, sangat penting,”ucapnya.

Delegasi Meksiko menekankan bahwa focus utama dalam hal ini adalah mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman dan tidak menangguhkan satu Negara pun dari badan pendukung Majelis Umum.

Perwakilan Myanmar mengatakan jelas bahwa kekejaman sedang dilakukan terhadap warga Ukraina. Perwakilan Myanmar mengatakan bahwa Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia, OHCHR telah memiliki bukti penggunaan munisi tandon oleh Rusia di daerah berpenduduk setidaknya dua lusin, serta penahanan sewenang-wenang dan kemungkinan penghilangan paksa jurnalis dan actor masyarakat sipil.

Perwakilan Federasi Rusia mengatakan draf resolusi yang sedang dipertimbangkan tidak ada hubungannya dengan situasi HAM yang sebenarnya di lapangan, menambahkan bahwa itu adalah upaya AS untuk mempertahankan posisi dominannya dan Upaya kolonialisme HAM dalam hubungan internasional. Federasi Rusia sepanjang keanggotaannya di Komisi HAM dan UNHRC secara konsisten mempertahankan prinsip kerja sama berdasarkan saling menghormati dan status yang setara.

Perwakilan dari Republik Demokratik Rakyat Korea menyuarakan keprihatinan bahwa beberapa negara terus mendorong konfrontasi dan ketidakpercayaan, alih-alih memprioritaskan pelonggaran ketegangan dan mencari solusi politik dan damai untuk krisis saat ini di Ukraina. Dia menolak inisiatif bermotivasi politik dan kurangnya objektivitas ketidaperpihakan dan transparansi, mencatat bahwa kekejaman yang dilaporkan terhadap

penduduk sipil di Ukraina belum diverifikasi atau dibuktikan secara resmi berdasarkan fakta atau bukti nyata. Investigasi independent harus, dilakukan, dan waktu serta Upaya substansif diperlakukan dalam hal itu, tegasnya, menunjukkan bahwa beberapa Negara Anggota bertindak sangat sembrono untuk tujuan politik mereka dengan mengajukan rancangan resolusi dan menambahkan bahwa tindakan politik dan sepihak seperti itu tidak akan terjadi. Membantu memecahkan masalah sama sekali.

Majelis Umum kemudian mengadopsi rancangan resolusi berjudul “Penangguhan hak keanggotaan Federasi Rusia Rusia di UNHRC” (dokumen A/ES-11/L.4) dengan suara tercatat 93 setuju dan 24 menentang, dengan 58 suara abstain.

Berdasarkan teks tersebut, Majelis memutuskan untuk menagguhkan hak keanggotaan di UNHRC dan meninjau masalah tersebut, sebagaimana mestinya. UNGA juga memutuskan untuk menunda sementara sesi khusus darurat kesebelas Majelis dan memberi wewenang kepada Presiden Majelis untuk melanjutkan pertemuannya atas permintaan dari Negara-negara Anggota.¹⁴

Menurut resolusi Majelis Umum tahun 1950 377A (V), yang dikenal luas sebagai ‘*Uniting for Peace*’, jika Dewan Keamanan tidak dapat bertindak karena kurangnya kebulatan suara di antara lima anggota tetap pemegang hak veto, UNGA memiliki kekuasaan untuk membuat rekomendasi kepada anggota PBB yang lebih luas untuk Langkah-langkah kolektif untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Keamanan menentukan kapan dan di mana operasi perdamaian PBB harus dikerahkan, tetapi secara historis, Ketika Dewan tidak dapat mengambil keputusan, UNGA melakukannya. Namun, tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi UNGA bersifat tidak mengikat, artinya negara tidak berkewajiban untuk mengimplementasikannya, yang berarti Rusia bisa saja tidak mengikuti keputusan yang diberikan oleh Majelis Umum. Pada tanggal 26 April, ditengah meningkatnya kritik atas kurangnya tindakan oleh Dewan Keamanan untuk menghentikan perang di Ukraina, Majelis Umum mengadopsi consensus sebuah resolusi penting yang mengharuskan lima anggota tetap Dewan membenarkan penggunaan hak veto mereka.

Pasal 6 Piagam PBB berbunyi :

Anggota PBB yang tetap melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ini dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan

¹⁴ United Nations. *General Assembly Adopts Text to Suspend Russian Federation from Human Rights Council*. Diakses pada, Juni, 16, 2023. <https://press.un.org/en/2022/ga12414.doc.htm>

ini belum pernah terjadi dalam sejarah PBB.

Pasal 5 menetapkan penangguhan suatu Negara Anggota :

Anggota PBB yang telah diambil tindakan ditangguhkan dari pelaksanaan hak dan hak istimewa keanggotaan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Pelaksanaan hak dan keistimewaan ini dapat dipulihkan oleh Dewan Keamanan.

Penangguhan atau pengusiran suatu Negara anggota dari Organisasi dilakukan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan. Rekomendasi semacam itu membutuhkan persetujuan dari anggota tetap Dewan Keamanan. Kecuali mereka menyetujui pengusiran atau penangguhan mereka sendiri, anggota tetap Dewan hanya dapat diberhentikan melalui amandamen Piagam PBB, sebagaimana diatur dalam Bab XVIII.

PBB, bagaimanapun, telah mengambil Langkah-langkah terhadap negara-negara tertentu Piagam PBB menguraikan proses dan kriteria penangguhan dan kehilangan keanggotaan. Kedua tindakan tersebut memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan dan UNGA. Penangguhan secara khusus diatur dalam pasal 5 Piagam PBB. Dalam Pasal 5 Piagam PBB, anggota PBB yang telah diambil tindakan pencegahan atau penegakan oleh Dewan Keamanan dapat ditangguhkan dari pelaksanaan hak dan hak Istimewa keanggotaan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Pelaksanaan hak dan keistimewaan ini dapat dipulihkan oleh Dewan Keamanan. Penangguhan umumnya tidak permanen, negara yang ditangguhkan tetap menjadi anggota dan terus terikat oleh kewajiban berdasarkan piagam PBB. Penangguhan memerlukan keputusan mayoritas dua pertiga oleh UNGA atas rekomendasi Sembilan anggota Dewan Keamanan termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan.¹⁵

KESIMPULAN

1. *United Nation Human Right Council* (UNHRC) dibentuk oleh Majelis Umum (UNGA) pada 15 Maret 2006 dengan resolusi 60/251, menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia. UNHRC mengadakan pertemuan sepanjang tahun menyediakan forum multiteral untuk menangani pelanggaran HAM dimanapun dan kapanpun itu terjadi. UNHRC memiliki kemampuan untuk membahas semua masalah tematik HAM dan situasi khusus negara yang memerlukan perhatiannya. UNHRC diberi mandate oleh Majelis Umum PBB untuk mempromosikan dan melindungi penikmatan dan realisasi penuh, oleh semua orang,

¹⁵ Humanitarian Careers. *Can A Country Leave the United Nations*. Diakses pada , Juni 20, 2023. <https://humanitariancareers.com/country-leave-united-nations>

semua HAM. UNHRC dapat mengadopsi teks dengan atau tanpa suara yang direkam. Untuk mengadopsi draf teks dengan pemungutan suara harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan. UNHRC memiliki prosedur khusus dalam kerjanya, dimana prosedur khusus dibentuk UNHRC untuk mengumpulkan pengamatan ahli dan ansihat tentang maslaah HAM dis eluruh belahan dunia.

2. Rusia ditangguhkan dari organisasi *United Human Right Council* (UNHRC) setelah aksinya melakukan serangan terhadap ukraina, Majelis Umum mengadakan rapat sesi dewan untuk mengambil suara atas keputusan penangguhan Rusia dari UNHRC, sebanyak 93 suara mendukung, 24 menentang, dan 58 suara abstain. Menurut Rusia keputusan yang diambil oleh Majelis Umum terlalu terburu-buru tanpa pertimbangan dan bukti yang kuat terkait tuduhan yang di layangkan bahwa rusia melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Akibat dari putusan tersebut Rusia memilih keluar dari UNHRC. Menurut Piagam PBB Majelis Umum berhak menangguhkan anggota dari badan organisasi meskipun putusan yang diberikan UNHRC tidak mengikat secara hukum. Setiap negara bisa keluar dari badan organisasi di bawah PBB dengan mereka keluar maka mereka akan menghentikan pendanaan terhadap badan organisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abid Zamzami, dkk. 2021. *Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)*, Malang: Unisma Press
- Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Booklet *Human Rights Council*
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 3, Malang, Banyumedia. Hlm. 295
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R & D, Alfabeta*, Bandung. Hlm. 6
- Soerjono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 19
- Sabon, Max Boli, 2019, *Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Unika Atma Jaya. Jakarta. Hlm. 28
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Majelis Umum

Jurnal/Skripsi

Lisa Karismawatie, Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Libya Sebagai Pelaksana Fungsi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional, Jawa Tengah, Skripsi Universitas Sebelas Maret

Internet

Aljazeera. *UN Suspend Russia from Human Rights body over Ukraine abuse*. Diakses pada, Juni 15, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/7/un-to-vote-on-suspending-russia-from-rights-council>

Humanitarian Careers. *Can A Country Leave the United Nations*. Diakses pada , Juni 20, 2023. <https://humanitariancareers.com/country-leave-united-nations/>

Internasional Justice Resource Center. Retrieved. Oktober, 29, 2016

Justice Resource Center. Oktober, 29, 2016.

McBeth, Nolan. *Rice The International Law of Human Rights*. 2011.

Resolution 5/1. United Nations Digital Library System. Archived

Special Procedures of the UN Human Rights Council. Section Annual reports. Internasional

Special Procedures of the Human Rights Council. Diakses pada, Juni, 10, 2023. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council>

Special Procedures of the UN Human Rights Council. Archived. Desember, 30, 2016.

United Human Rights. *What Are Human Rights ?*. Diakses pada. Juni, 11, 2023. <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>

United Nation Human Rights Council. *About UHNRC*. Diakses pada, Juni, 12, 2023. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council>

United Nation. *Un System* . Diakses pada Mei, 04, 2023. <https://www.un.org/en/about-us/un-system>

United Nations. *General Assembly Adopts Text to Suspend Russian Federation from Human Rights Council*. Diakses pada, Juni, 16, 2023. <https://press.un.org/en/2022/ga12414.doc.htm>